

**RUANG LINGKUP PROGRAM / KEGIATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM POKOK (BIDANG DAN UPT)

NO.	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
I.	<i>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</i>
1.	Pengelolaan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil di luar minyak dan gas bumi
2.	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
II.	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</i>
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
2.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
4.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
5.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6.	Penetapan lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
7.	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
8.	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
9.	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
10.	Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
III.	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</i>
1.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya di laut sampai dengan 12 Mil serta tidak menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3.	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan berukuran sampai dengan 30 GT yang beroperasi di wilayah administrasinya, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
4.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut

NO.	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
<i>IV.</i>	<i>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</i>
1.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
2.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
<i>V.</i>	<i>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</i>
1.	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
3.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI (SEKRETARIAT)**

NO.	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah